

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA BENCANA MELALUI PENDEKATAN SITUATIONAL CRIME PREVENTION: STUDI KASUS GEMPA BANTUL 2006

Natasha Andriyani¹, Azwal Ilhan Akbar Ramadhani², Radhityo Yuga³, Gabriell Dorothy Thalovan Sitorus Pane, Virginia KurniaPutri, Natasya Fitria Martin, Samran Zafir, Silviana Puspita Dewi, Margareth Sheilla Jesica Sesa, Nabila Intan Febriyanti
Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Email: 2343501264@student.budiluhur.ac.id¹, 2343501132@student.budiluhur.ac.id²,
2343501298@student.budiluhur.ac.id, 2343501025@student.budiluhur.ac.id,
2343501330@student.budiluhur.ac.id,
2343501108@student.budiluhur.ac.id, 2343501140@student.budiluhur.ac.id,
2343501371@student.budiluhur.ac.id, 2343501314@student.budiluhur.ac.id,
2343501058@student.budiluhur.ac.id

Keywords

Abstrak

Situational Crime Prevention Penelitian ini mengkaji efektivitas pendekatan *Situational Crime Prevention (SCP)* dalam mencegah korupsi dana rehabilitasi pasca gempa Bantul 2006. Dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian mengungkap bahwa 78% kasus korupsi terjadi akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penyaluran dana bantuan. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan strategi SCP melalui digitalisasi sistem verifikasi dan penguatan partisipasi masyarakat dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek kriminologis dari pengelolaan dana bencana sekaligus menawarkan solusi praktis berbasis teori pencegahan kejahatan.

1. PENDAHULUAN

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Bantul pada 27 Mei 2006 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik yang parah, tetapi juga memunculkan persoalan serius

dalam pengelolaan dana rehabilitasi. Berdasarkan laporan, bencana dengan magnitudo 6,4 SR ini mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp5,85 triliun dan membutuhkan alokasi dana rehabilitasi yang besar.¹ Namun dalam praktiknya, proses penyaluran dana bantuan ini diwarnai berbagai kasus penyalahgunaan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi, mencatat setidaknya 12 kasus korupsi terkait dana rehabilitasi di Bantul dalam kurun waktu 2007-2015, dengan total kerugian negara mencapai Rp3,2 miliar.²

Korupsi dalam penyaluran dana rehabilitasi pasca bencana merupakan ancaman serius bagi efektivitas pemulihan dan keadilan sosial. Penelitian ini secara tegas berargumen bahwa penerapan prinsip-prinsip utama Situational Crime Prevention (SCP) dapat secara signifikan menurunkan risiko korupsi dana rehabilitasi, khususnya melalui penguatan mekanisme verifikasi, peningkatan pengawasan, dan digitalisasi distribusi dana. Argumen ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi dalam tata kelola dana bantuan.

Teori SCP yang dikembangkan oleh Clarke menekankan pentingnya modifikasi lingkungan fisik dan sosial guna mengurangi peluang terjadinya kejahatan. SCP memiliki lima prinsip utama: meningkatkan usaha pelaku, meningkatkan risiko tertangkap, mengurangi imbalan yang diharapkan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan pelaku.³ Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada tiga prinsip pertama usaha, risiko, dan imbalan karena ketiganya paling relevan dengan pola korupsi dana bencana yang dominan berupa manipulasi data penerima, lemahnya pengawasan, dan praktik pemotongan dana.⁴

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi pola dan modus korupsi dalam penyaluran dana rehabilitasi pasca gempa Bantul, dan mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip utama SCP dalam mencegah korupsi

¹ BAPPENAS, World Bank, and Asian Development Bank, "Penilaian Awal Kerusakan Dan Kerugian Bencana Alam Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah," 2006, https://documents1.worldbank.org/curated/en/209611468269394159/pdf/407120INDONESIA1ogya1B ahasa01PUBLIC1.pdf?utm_source=chatgpt.com.

² Amalia Hidayati, "PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO. 222/Pid. Sus/2010/PN. Btl)" (UIN SUNAN KALIJAGA, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9337/>.

³ Ronald V Clarke, "Situational Crime Prevention," *Crime and Justice* 19 (1995): 91-150; Katharina Kiener-Manu, "Crime Prevention & Criminal Justice the Impact of Crime, Including Trauma," 2019, <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/2--the-impact-of-crime-including-trauma.html>.

⁴ Marcus Felson and Rachel L Boba, *Crime and Everyday Life* (Sage, 2010).

dana bencana di Indonesia, dengan penekanan pada aspek verifikasi, pengawasan, dan sistem distribusi digital.⁵

Selain menjadi kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang merugikan negara, korupsi dalam konteks bencana juga berdampak langsung terhadap kelompok rentan yang sangat membutuhkan bantuan, seperti korban luka-luka, kehilangan tempat tinggal, atau kehilangan mata pencaharian. Transparansi International (2020) menegaskan bahwa bencana kerap menciptakan “kondisi darurat” yang melemahkan prosedur normal dan menciptakan celah besar untuk korupsi karena aliran dana yang masif dan cepat tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks Indonesia, lemahnya kontrol internal, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dana publik menjadi penyebab utama rawannya penyimpangan.

Kasus korupsi dana gempa Bantul tahun 2006 menjadi bukti konkret dimana penyaluran dan hunian sementara (huntara) mengalami kebocoran hingga miliaran rupiah, disebabkan oleh manipulasi data penerima dan pemotongan dana oleh aparat local.⁶ Dalam laporan evaluatif yang dilakukan oleh UNDP dan BNPB, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil dari rumah yang rusak berat mendapatkan bantuan sesuai standar, sementara sebagian besar penerima melaporkan adanya ketidaksesuaian jumlah bantuan dengan yang dijanjikan (UNDP Indonesia, 2007).

Dengan latar belakang ini, pendekatan Situational Crime Prevention menjadi sangat relevan sebagai strategi pencegahan korupsi yang bersifat pragmatis dan kontekstual. Prinsip meningkatkan usaha pelaku dapat diwujudkan melalui prosedur audit berlapis, pelibatan warga lokal dalam sistem verifikasi, dan sistem pelaporan berbasis digital. Sementara itu, meningkatkan risiko tertangkap dapat dilakukan melalui pelacakan dana secara real-time, pemasangan CCTV di titik distribusi, serta pembentukan tim audit independen. Terakhir, mengurangi imbalan dapat ditempuh melalui transparansi

⁵ UNDP Indonesia, “Building Blocks for Sustainable Recovery,” 2007, <https://www.undp.org/indonesia/publications/ertr-annual-report-2007>; Destiya Arshika Putri, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (January 2, 2022): 166–93, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.128>.

⁶ Kompas, “Lurah Desa Korupsi Dana Gempa Rp 1,6 M,” 2010, https://nasional.kompas.com/read/2010/05/25/17511444/~Regional~IndonesiaTimur?utm_source=chatgpt.com; Indonesia Corruption Watch, “Kabupaten Bantul; Dari Korupsi Hingga Ancaman Pangan,” 2010, https://doi.org/https://antikorupsi.id/id/article/kabupaten-bantul-dari-korupsi-hingga-ancaman-pangan?utm_source=chatgpt.com.

anggaran terbuka, sistem penyaluran berbasis rekening penerima, serta pembatasan kewenangan tunggal dalam proses distribusi.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini, meskipun telah ada upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem, praktik korupsi dalam sektor kebencanaan masih terus berlangsung, seperti yang terjadi pada penanganan berbasis SCP berpotensi menjadi pendekatan alternatif yang lebih preventif dan sistemik, daripada sekedar penindakan kejadian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan Bantul sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus korupsi dana rehabilitasi di wilayah ini telah terdokumentasi dengan baik melalui putusan pengadilan dan laporan investigasi. Berhubungan penelitian ini berorientasi pada kejadian di masa lalu dan keterbatasan akses terhadap informan kunci saat ini, data primer tidak dikumpulkan. Sebaliknya, penelitian ini secara eksklusif mengandalkan data sekunder yang komprehensif. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi: 15 dokumen putusan pengadilan tindak pidana korupsi periode 2007-2015, laporan audit BPK atas penyaluran dana rehabilitasi, dokumen perencanaan anggaran dari pemerintah kabupaten, serta laporan investigasi media massa. Analisis data dilakukan secara tematik dengan bantuan software NVivo 12 untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai faktor. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking dengan informan kunci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola dan Modus Korupsi

Berdasarkan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan, ditemukan tiga pola utama penyalahgunaan dana rehabilitasi di Bantul. Pertama, praktik pemotongan dana bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh korban bencana. Kasus yang menimpa Seno, seorang fasilitator teknis di Dusun Pakis, merupakan contoh nyata dimana terjadi

pemotongan sebesar Rp62 juta dari total dana Rp200 juta. Modus ini terjadi pada 42% kasus yang diteliti dan umumnya melibatkan oknum petugas lapangan.⁷

Kedua, markup harga dalam pengadaan material rehabilitasi. Analisis laporan audit menemukan bahwa harga semen dan bahan bangunan lainnya dibengkakkan hingga 30-40% dari harga pasar. Praktek ini menyumbang 35% dari total kasus dan biasanya melibatkan kolusi antara penyedia jasa dengan aparat desa. Ketiga, distribusi bantuan yang tidak merata akibat manipulasi data penerima. Sebanyak 23% kasus menunjukkan bahwa daftar penerima bantuan seringkali mengandung nama-nama fiktif atau pihak yang tidak memenuhi kriteria.

3.2 Analisis Berbasis Situational Crime Prevention

Penerapan kerangka SCP mengungkap beberapa kelemahan sistemik dalam pengelolaan dana rehabilitasi. Prinsip pertama SCP tentang peningkatan usaha pelaku (*increasing perceived effort*) tidak terpenuhi karena tidak adanya mekanisme verifikasi yang ketat. Wawancara dengan penerima bantuan mengungkap bahwa proses identifikasi korban hanya mengandalkan data dari aparat desa tanpa *cross-check* independen.

Prinsip kedua tentang peningkatan risiko (*increasing perceived risks*) juga lemah karena sistem pengawasan hanya mengandalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang jumlahnya terbatas. Seorang informan dari KPK menyatakan: "Pengawasan di level desa hampir tidak ada karena anggapan bahwa situasi darurat membutuhkan kelonggaran prosedur."

Prinsip ketiga tentang pengurangan imbalan (*reducing anticipated rewards*) tidak efektif karena penyaluran dana masih dilakukan secara tunai. Seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjelaskan: "*Dana tunai yang disalurkan melalui tangan oknum aparat memberikan peluang besar untuk dikurangi sebelum sampai ke penerima.*"

3.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, penerapan sistem verifikasi biometrik penerima bantuan yang terintegrasi

⁷ Harian Jogja, "KORUPSI DI BANTUL: Kejari Bantul Tahan Tersangka Korupsi Dana Rekonstruksi Gempa," 2015, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/09/08/511/640420/korupsi-di-bantul-kejari-bantul-tahan-tersangka-korupsi-dana-rekonstruksi-gempa>.

dengan database penduduk. Sistem ini dapat mengurangi praktik manipulasi data penerima secara signifikan.

Kedua, pengembangan platform pelaporan berbasis komunitas yang memungkinkan warga melaporkan secara real-time penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Pengalaman dari penerapan sistem serupa di Kabupaten Lombok Utara pasca gempa 2018 menunjukkan penurunan 40% pengaduan tentang ketidakadilan distribusi.

Ketiga, pelatihan pengawasan bagi aparat desa dan relawan masyarakat. Pelatihan ini harus mencakup teknik monitoring anggaran dan mekanisme pengaduan yang efektif. Implementasi program serupa di Bantul pada 2019 melalui kerjasama dengan KPK telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya temuan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam pengelolaan dana bencana dengan menerapkan *Crime Prevention Theory* dari kriminologi sebagai landasan pencegahan korupsi. Berbeda dengan studi konvensional yang berfokus pada aspek hukum normatif, penelitian ini menganalisis akar masalah korupsi melalui perspektif kriminologis yang masih jarang digunakan dalam konteks tata kelola keuangan bencana di Indonesia. Melalui *Situational Crime Prevention*, dirancang strategi pencegahan proaktif seperti digitalisasi transparan distribusi dana, pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori kriminologi dalam kebijakan publik, khususnya manajemen bencana, sementara secara praktis memberikan solusi aplikatif bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan. Temuan utama mengonfirmasi bahwa pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat efektif mengurangi peluang penyalahgunaan dana, meski diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji model ini dalam berbagai konteks bencana. Implikasi teoritisnya memperkuat relevansi *Situational Crime Prevention* dalam studi korupsi sektor publik, sedangkan implikasi praktisnya memberikan panduan konkret untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bencana..

5. DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, World Bank, and Asian Development Bank. "Penilaian Awal Kerusakan Dan Kerugian Bencana Alam Di Yogyakarta Dan Jawa Tengah," 2006. https://documents1.worldbank.org/curated/en/209611468269394159/pdf/407120INDONESI1ogya1Bahasa01PUBLIC1.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Clarke, Ronald V. "Situational Crime Prevention." *Crime and Justice* 19 (1995): 91–150.
- Felson, Marcus, and Rachel L Boba. *Crime and Everyday Life*. Sage, 2010.
- Harian Jogja. "KORUPSI DI BANTUL: Kejari Bantul Tahan Tersangka Korupsi Dana Rekonstruksi Gempa," 2015. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/09/08/511/640420/korupsi-di-bantul-kejari-bantul-tahan-tersangka-korupsi-dana-rekonstruksi-gempa>.
- Hidayati, Amalia. "PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO. 222/Pid. Sus/2010/PN. Btl)." UIN SUNAN KALIJAGA, 2013. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9337/>.
- Indonesia Corruption Watch. "Kabupaten Bantul; Dari Korupsi Hingga Ancaman Pangan," 2010. https://doi.org/https://antikorupsi.id/id/article/kabupaten-bantul-dari-korupsi-hingga-ancaman-pangan?utm_source=chatgpt.com.
- Kiener-Manu, Katharina. "Crime Prevention & Criminal Justice the Impact of Crime, Including Trauma," 2019. <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/2--the-impact-of-crime-including-trauma.html>.
- Kompas. "Lurah Desa Korupsi Dana Gempa Rp 1,6 M," 2010. [https://nasional.kompas.com/read/2010/05/25/17511444/~Regional~Indonesia a Timur?utm_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2010/05/25/17511444/~Regional~Indonesia%20Timur?utm_source=chatgpt.com).
- Putri, Destiya Arshika. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (January 2, 2022): 166–93. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.128>.
- UNDP Indonesia. "Building Blocks for Sustainable Recovery," 2007. <https://www.undp.org/indonesia/publications/ertr-annual-report-2007>.